

**PENGARUH MODERASI TEKNOLOGI INFORMASI ATAS
HUBUNGAN PERENCANAAN, IMPLEMENTASI,
PELAPORAN DAN EVALUASI ANGGARAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kota Palembang)**



Tesis Oleh:

WENDRA ALIFFANDI

NIM: 01022682024024

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Magister
Pada
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi BKU Akuntansi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Perencanaan, Implementasi, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang).

Nama Mahasiswa : Wendra Aliffandi

NIM : 01022682024024

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Kekhususan : BKU Akuntansi

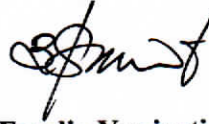
Menyetujui

Pembimbing 1,



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak
NIP.197212152003122001

Pembimbing 2,



Dr. Emylia Yuniarti, S.E., M.Si., Ak
NIP.197106021995032002

Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP.197007162008012015

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.
NIP.196706241994021002

Tanggal Kelulusan: 14 Juli 2023



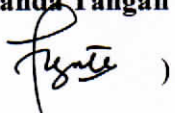



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Palembang-Prabumulih Kilometer 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662

Telepon. (0711) 580964, Faksimile (0711) 580-964

Laman: <http://fe.unsri.ac.id> email: dekan@fe.unsri.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Keterangan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak NIP.197212152003122001	()
Sekretaris	Dr. Emylia Yuniarti, S.E., M.Si., Ak NIP.197212152003122001	()
Anggota	1. Dr. Tertiarto Wahyudi, MAFIS., Ak NIP.196310041990031002	()
	2. Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si NIP.1671021206850012	()



**BUKTI TELAH MEMPERBAIKI TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak		25/08/23
2	Dr. Emylia Yuniarti, S.E., M.Si., Ak		2/9/23
3	Dr. Tertiarto Wahyudi, MAFIS., Ak		25/08/23
4	Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si		1/09/23

Menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Wendra Aliffandi

NIM : 01022682024024

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Kekhususan : BKU Akuntansi

Judul Tesis : Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Perencanaan, Implementasi, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang).

Telah memperbaiki hasil ujian tesis

Palembang, Agustus 2023
Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP.197007162008012015

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wendra Aliffandi
NIM : 01022682024024
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Bidang Kajian : BKU Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul :

Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Perencanaan, Implementasi, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang).

Pembimbing I : Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak
Pembimbing II : Dr. Emylia Yuniarti, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam Tesis ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan

Palembang, Agustus 2023



Wendra Aliffandi

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Perencanaan, Implementasi, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang)”.

Alhamdulillah, penyusunan Tesis ini bisa diselesaikan dan berjalan dengan lancar walaupun terdapat kesulitan dan hambatan. Hal ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian. Sehingga saran dan kritik sangatlah membantu dalam penyempurnaan Tesis ini. Penulis berharap semoga penulisan tesis memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Palembang, Agustus 2023



Wendra Aliffandi

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini merupakan hasil bimbingan, konsultasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada :

1. Ibu Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Emylia Yuniarti, S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmunya berupa bimbingan, arahan serta saran selama penyusunan tesis ini.
2. Keluarga tercinta, teruntuk Ayahanda, Ibunda, Istri, Anak-anak, Mertua dan Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan terbaik dan sebesarnya untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana dan dukungan dalam penulisan tesis ini.
3. Penguji proposal tesis dan ujian tesis, Bapak Dr. Tertiaro Wahyudi, MAFIS., Ak dan Bapak Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
4. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU., ASEAN. Eng, Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, dan Ibu Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya serta Mbak Yusnidar, selaku staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. BPHM Universitas Sriwijaya (Unsri) tempat kerja dan menjadi rumah kedua setiap harinya. Terima kasih kepada Kepala BPHM Unsri, Bapak Dedi Supriadi, S.T., M.Si, Bapak Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom sebagai Koordinator Perencanaan BPHM Unsri, Bapak Nopizah, S.Sos sebagai Sub Koordinator EPPA BPHM Unsri dan tentunya rekan-rekan kerja seperjuangan di BPHM Unsri, Siska, Akbar, Putri, Imam,

Febriansyah, Pak Edi, Mbak Susi, Kak Asep, terima kasih sudah menjadi *support system* terbaik selama menempuh perjalanan studi pasca sarjana ini.

6. Teman-teman seangkatan di S2 Ilmu Ekonomi TA 2021, sukses selalu untuk kita semua.

ABSTRAK

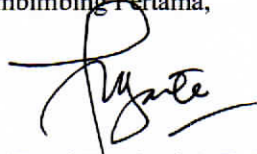
PENGARUH MODERASI TEKNOLOGI INFORMASI ATAS HUBUNGAN
PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, PELAPORAN DAN EVALUASI
ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kota Palembang)

Oleh:
Wendra Aliffandi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moderasi teknologi informasi atas hubungan perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Palembang. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam lingkungan pemerintahan Kota Palembang sebanyak 52 OPD. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dimana diasumsikan setiap OPD diambil sebanyak 3 orang pegawai sehingga diperoleh sampel sebanyak 156 orang. Teknik analisis yang digunakan yaitu *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, implementasi, pelaporan, evaluasi anggaran secara langsung tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, hanya teknologi informasi yang secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Kemudian teknologi informasi hanya mampu memoderasi atas hubungan perencanaan dan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan atas hubungan implementasi dan pelaporan anggaran teknologi tidak mampu memoderasi terhadap akuntabilitas kinerja. Untuk peningkatan akuntabilitas kinerja diperlukan soliditas dan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, OPD dan Inspektorat selaku aktor utama dalam memanfaatkan seoptimal mungkin penerapan teknologi informasi dalam hal sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Perencanaan, Implementasi, Pelaporan, Evaluasi, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja

Pembimbing Pertama,



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

Pembimbing Kedua,



Dr. Emylia Yuniarti, S.E., M.Si., Ak.CA
NIP. 197106021995032002

Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP 197007162008012015

ABSTRACT

MODERATING EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE
RELATIONSHIP AMONG PLANNING, IMPLEMENTATION, REPORTING
AND EVALUATION BUDGETING ON PERFORMANCE
ACCOUNTABILITY OF THE LOCAL GOVERNMENT
(A Study on Palembang City Government)

by:
Wendra Aliffandi

This study aims to analyze the moderating effect of information technology on the relationship among budget plan, implementation, report and evaluation on the accountability of the local government performance in Palembang City. The population in this study was all regional apparatus organizations (OPD) within the Palembang City government as many as 52 OPDs. The sampling technique was purposive sampling which 3 employees were taken each OPD so that a sample of 156 people was obtained. The analysis technique was Structural Equation Model (SEM) based on Partial Least Square (PLS). The results showed that budget planning, implementation, reporting, evaluation directly had no effect on performance accountability, while information technology directly affected performance accountability. Moreover information technology was only able to moderate the relationship between budget planning and evaluation on performance accountability. While the relationship between budget implementation and reporting technology was not able to moderate performance accountability. To improve performance accountability, solidity and cooperation among the Regional Development Planning Agency, OPD and Inspectorate as the main actors are needed to make information technology application in terms of The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP).

Keywords: Information Technology, Planning, Implementation, Evaluation, Budget, Reporting, Performance Accountability

First Advisor,



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

Second Advisor,



Dr. Emylia Yuniarti, S.E., M.Si., Ak.CA
NIP. 197106021995032002

Head of The Study Program
Master of Economics,



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP 197007162008012015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iii
BUKTI TELAH MEMPERBAIKI TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Teori Agensi	13
2.2. Teori Implementasi Kebijakan	15
2.3. Akuntabilitas Kinerja.....	17
2.4. Anggaran Berbasis Kinerja.....	22
2.5. Teknologi Informasi	36
2.6. Penelitian Terdahulu.....	39
2.7. Kerangka berfikir.....	51
2.8. Pengembangan Hipotesis.....	52
2.8.1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas	

Kinerja	52
2.8.2. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja.....	53
2.8.3. Pengaruh Pelaporan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja	55
2.8.4. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja	56
2.8.5. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja	58
2.8.6. Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja...	59
2.8.7. Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Impelementasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja	61
2.8.8. Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Pelaporan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja.....	62
2.8.9. Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	66
3.1. Jenis Penelitian	66
3.2. Jenis dan Sumber Data	66
3.3. Populasi dan Sampel.....	67
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	68
3.4.1. Variabel Terikat (Dependent Variable)	68
3.4.2. Variabel Bebas (Independent Variable).....	69
3.4.3. Variabel Moderasi	69
3.4.4. Definisi Operasional Variabel	70
3.5. Metode Pengumpulan Data	73
3.6. Teknik Analisis Data	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
4.1. Hasil Penelitian.....	79
4.1.1. Profil Responden	79
4.1.2. Analisis Outer Model	82
4.1.3. Analisis Model Struktural (Inner Model)	87
4.1.4. Uji Hipotesis	90
4.2. Pembahasan	96
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran	119
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	119
5.4. Implikasi Manajerial	120
 DAFTAR PUSTAKA	 122
Lampiran-lampiran.....	128

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2020.....	2
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian.....	67
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	70
Tabel 3. 3 Skala Pengukuran Kuisisioner.....	73
Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran Kuisisioner.....	79
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	80
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia.....	81
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Masa Kerja	81
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	82
Tabel 4. 6 Outer Loadings.....	82
Tabel 4. 7 Outer Loadings Re – Estimasi Ke 1	84
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	85
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Konstruk.....	86
Tabel 4. 10 F Square	88
Tabel 4. 11 R Square.....	89
Tabel 4. 12 Inner VIF Values.....	90
Tabel 4. 13 Path Coefficient.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	51
Gambar 3. 1 Model Penelitian	75
Gambar 4. 1 <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	86
Gambar 4. 2 Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Variabel.....	87
Gambar 4. 3 Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen Baik.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Pengantar Izin Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.....	129
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.....	130
Lampiran 3. Surat Keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang.....	131
Lampiran 4. Surat Pengantar Kuisisioner	132
Lampiran 5. Kuisisioner	133
Lampiran 6. Hasil Uji SmartPLS Versi 3	139
Lampiran 7. Tabel Data Tabulasi Responden.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pemerintah Indonesia sehubungan dengan kinerjanya pada pertumbuhan ekonomi konsisten positif, mengindikasikan Indonesia pulih. Gejolak ketidakpastian global mampu diredam dengan pertumbuhan ekonomi yang tembus melebihi 5% pada kuartal II tahun 2022. Diprediksi terus tumbuh hingga akhir tahun. Anggaran pemulihan ekonomi tangguh menahan guncangan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Empat ratus lima puluh lima triliun disiapkan tahun ini untuk memberikan bantuan bagi masyarakat, penanganan kesehatan sekaligus memperkuat pulihnya perniagaan negeri ini. Capaian ini pun diikuti oleh surplus neraca dagang di sektor perindustrian. Performa ekonomi

Indonesia pun kian meyakinkan dan menciptakan optimisme (Staf Kepresidenan Republik Indonesia, 2022).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya, Pemerintah Kota Palembang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palembang tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realiasi	Capaian
1	Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah	1	Persentase Kondisi Jalan Baik dan Sedang	65%	79,8%	122,77%
2	Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan	2	Persentase Pengurangan Genangan Air	55%	56,06%	101,93%
3	Meningkatnya Kualitas SDM	3	Indeks Pembangunan Manusia	78,51 Indeks	78,33 Indeks	99,77%
4	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat	4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	6,8%	9,86%	68,95%
		5	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,32%	1,38%	95,65%
5	Berkembangnya Nilai-Nilai Perikehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen	6	Persentase Jumlah Jamaah Shalat Subuh di Masjid dan Mushollah	55%	41,33%	75,14%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realiasi	Capaian
	Masyarakat					
6	Terlaksananya Good Governance Practices dan Reformasi Birokrasi	7	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	WTP	WTP	100%
		8	Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang	BB		
7	Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan	9	Indeks GINI (skala 0-1)	0,354 Indeks	0,358 Indeks	98,88%
8	Meningkatnya Investasi Daerah	10	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Rp.3.120.000.000 (Rp 1.580.000.000.000)	Rp.1.481.986.000.000	93,79%
9	Berkembangnya Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Daya Kreasi yang digerakkan oleh Masyarakat (community centered)	11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,55-6,05%	5,94%	107,03%
		12	Persentase Penduduk Miskin	10,40%	10,89%	95,50%
		13	Persentase Koperasi Aktif	82,86%	82,99%	100,16%
		14	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	84,66%	61,33%	72,44%
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	15	Jumlah Kunjungan Wisata	2.400.000 Jiwa	895.912 Orang	37,33%
		16	Jumlah Event Olahraga TK Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional	11 Event	13 Event	118,2 %

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui capaian kinerja Pemerintah Kota Palembang dari 10 sasaran strategis hanya 3 sasaran yang tercapai 100% yaitu 1) Kebutuhan infrastruktur (122,77%); 2) Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan (101,03%) dan 3) Terlaksananya *Good Governance Practices* dan

Reformasi Birokrasi (100%). Sedangkan sisanya masih belum tercapai, hal ini dikarenakan untuk penurunan pertumbuhan IPM Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kemudian meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dikarenakan 1) adanya pandemi covid-19; 2) ditundanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja secara langsung; 3) kurangnya anggaran peningkatan sumber daya manusia; 4) rendahnya kesadaran pengusaha dalam pelaksanaan peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan; dan 5) tidak seimbangya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Capaian kinerja gerakan Shalat Subuh Berjamaah menurun dari target yang ditetapkan akibat pengaruh dari pandemi Covid 19 dimana masyarakat maupun aparatur tidak banyak yang melaksanakan shalat berjamaah di Masjid maupun Mushollah sehingga aplikasi Si Abuh banyak tidak digunakan. Terjadinya penurunan jumlah investasi di Kota Palembang hal ini dikarenakan banyaknya investor tidak melapor ke PMDN/PMA sehingga data yang disampaikan ke LKPM tidak mengalami penambahan investasi. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Palembang mencapai 182,61 ribu orang (10,89 persen). Meningkat sebesar 1,94 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2019 yang sebesar 180,67 ribu orang (10,90) persen). Hal ini dikarenakan 1) kurang tepat sasaran program dan kegiatan yang dijalankan oleh OPD; 2) hambatan dalam pelaksanaan pembinaan bisnis rumahan terhalang dalam hal permodalan.

Persentase Penilaian Kesehatan koperasi sebesar 61,33% dari target sebesar 84,66%, sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 72,44% dengan

koperasi yang dinilai kesehatannya sebesar 92 koperasi dari target sebesar 150 koperasi. Kondisi tidak tercapai ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga koperasi tidak dapat melaksanakan rapat anggota tahunan dan keterlambatan penyampaian laporan tahunan koperasi sehingga penilaian kesehatan koperasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai target. Minat kunjungan wisatawan ke Kota Palembang apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 sangat menurun sekitar 49% dan tidak memenuhi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 sejak pertengahan bulan Maret 2020 lalu yang menyebabkan 30 event wisata di Palembang batal digelar. Pada 2020 ditargetkan 2,4 juta wisatawan, namun hanya 895.912 ribu wisatawan yang datang, artinya hanya 37,33%. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD 12.500.000 Jiwa maka capaian kinerja Tahun 2020 masih berada pada posisi 7,2%.

Kinerja Pemerintah Kota Palembang, dalam Tahun Anggaran 2020, untuk pencapaian kinerja 10 (sepuluh) sasaran strategis Pemerintah Kota Palembang yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.180.568.812.333,76 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.534.430.114.826,75,- atau 84,54%. Berdasarkan uraian capaian kinerja Pemerintah Kota Palembang di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Palembang sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat indikator yang kurang. Hal ini terlihat dari hasil analisis pencapaian

Pengukuran Kinerja terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 7 indikator kinerja bermakna Baik Sekali, 5 Indikator kinerja bermakna Baik, 2 Indikator kinerja bermakna Cukup dan 1 Indikator kinerja berkategori Kurang.

Berbagai penelitian menyatakan bahwa Akuntabilitas kinerja pemerintah dipengaruhi oleh perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban anggaran (Wibisono, 2016), evaluasi kinerja (Utami, 2017), pengendalian akuntansi (Fathia, 2017) (Gani, 2020), sistem informasi pengelolaan keuangan (Yuliani, 2018), penyerapan anggaran (Fadhilatunnisa et al., 2021), pendanaan peradilan dan keseimbangan antara alokasi sumber daya (ekuitas) dan kinerja (equality) (Viapina, 2020). Kemudian penelitian lain yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh manajemen publik baru antara realitas dan ilusi (Mauro, 2017), kinerja penganggaran (Klase, 2008), model perencanaan anggaran (Kung et al., 2013), akuntabilitas dan penerapan anggaran (Olurankinse & Oloruntoba, 2017), alokasi belanja modal (Ogujiuba & Ehigiamusoe, 2014), Cost Control and Accountability (Lawyer, 2014), sistem pengendalian internal (Mattoasi et al., 2021).

Perencanaan anggaran merupakan subsistem perencanaan strategis (*strategic planning*), secara teknis dilaksanakan dengan sistem anggaran kinerja yang didahului dengan perencanaan kinerja. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan isu-isu strategis yang direspon dengan program dan kegiatan yang relevan (Latif, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2016) dimana hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Setelah perencanaan anggaran disahkan langkah selanjutnya adalah tahap implementasi anggaran. Implementasi anggaran berbasis kinerja begitu penting dikaji dalam penelitian ini. Dilihat dari sudut pandang rasional, implementasi anggaran berbasis kinerja merupakan isu teknis. Sistem pengukuran kinerja yang dilandasi oleh konsep value for money, dan anggaran yang berorientasi hasil yang menekankan pemikiran logis dan rasional dalam mengelola suatu perubahan dalam suatu organisasi. Organisasi kemudian dapat dimodifikasi dengan mengaplikasikan perencanaan rasional secara ilmiah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi keseluruhan organisasi (Julnes, 2011). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tindak lanjut dari implementasi anggaran adalah penyampaian laporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja yang harus dibuat meliputi laporan kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Mardiasmo, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anisa & Haryanto (2022) dalam penelitiannya yakni sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Proses akhir dari suatu anggaran adalah evaluasi anggaran yang merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen (Kenis, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel evaluasi anggaran terhadap akntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi maupun kinerja individu yang bersangkutan (Aji, 2015). Hal ini berhubungan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang bertujuan untuk membantu manajemen tingkat menengah agar dapat mengendalikan instansi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif, sehingga implementasi SIKD merupakan salah satu bentuk pengendalian yang digunakan untuk pencapaian kinerja. Implementasi SIKD ditujukan dalam rangka mengelola dana secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel (Bastian, 2016).

Pada penelitian ini variabel teknologi informasi digunakan sebagai variabel pemoderasi dikarenakan dengan dilakukannya sistem perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi anggaran bila didukung oleh teknologi informasi maka diharapkan akan menghasilkan

akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Sehingga perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dimana pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat (Aji, 2015).

Penelitian sehubungan dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi diantaranya Sudaryanti (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Winara & Putri, (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi sebagai pemoderasi dapat memperkuat hubungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan keuangan evaluasi, manfaat dengan akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2016) dan Utami (2017) namun peneliti menambahkan variabel teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Kemudian peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Winara & Putri, (2019) namun peneliti menambahkan variabel pertanggungjawaban sebagai variabel bebasnya. Selanjutnya penelitian Sudaryanti (2013) namun yang membedakannya peneliti memecah variabel penganggaran menjadi perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran.

Berdasarkan fenomena gap dan research gap yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Perencanaan, Implementasi, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh implementasi anggaran secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh pelaporan anggaran secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang?
4. Bagaimana pengaruh evaluasi anggaran secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang?
5. Bagaimana pengaruh teknologi informasi secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang?
6. Bagaimana pengaruh moderasi teknologi informasi atas hubungan perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang?
7. Bagaimana pengaruh moderasi teknologi informasi atas hubungan implementasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang?
8. Bagaimana pengaruh moderasi teknologi informasi atas hubungan pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang?
9. Bagaimana pengaruh moderasi teknologi informasi atas hubungan evaluasi

anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh perencanaan anggaran secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh implementasi anggaran secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang.
3. Untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh pelaporan anggaran secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang.
4. Untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh evaluasi anggaran secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang.
5. Untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh teknologi informasi secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang.
6. Untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh moderasi teknologi informasi atas hubungan perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang.
7. Untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh moderasi

teknologi informasi atas hubungan implementasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang.

8. Untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh moderasi teknologi informasi atas hubungan pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang.
9. Untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh moderasi teknologi informasi atas hubungan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan peneliti sehubungan dengan perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran, evaluasi anggaran, teknologi informasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta teori agensi dan teori implementasi kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi sebagai bahan pemikiran dan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah khususnya Kota Palembang dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*. Andi Offset.
- Afdhal, A. M. N., & Rahayu, A. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 57–65.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ahyari, F., & Ayem, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*, 1(1), 1–17.
- Aji, S. (2015). *Pengantar Teknologi Informasi*. Salembah Infotik.
- Amran, A. (2019). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH: PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PALOPO. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1–19.
- Anastasia, D. R. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)*. POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
- Anisa, I. N., & Haryanto. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85.
- Anthony, & Govindarajan. (2015). *Management Control System* (Edisi Pert). Salemba Empat.
- Anwar, A., Laan, R., & Sunarya, H. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor. *JURNAL AKUNTANSI (JA)*, 3(1), 29–44.
- Arnold, M. C., & Gillenkirch, R. M. (2015). Using negotiated budgets for planning and performance evaluation: An experimental study. *Accounting, Organizations and Society*, 43, 1–16.
- Ashari, A. R. (2020). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu)*. Universitas Tadulako.
- Astuty, E. dan E. H. F. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *E-Journal, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya*.
- Bappenas. (2016). *Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor*. Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Basri, S., & Sutriana. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO*, 93–105.
- Bastian. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Erlangga.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik* (Ketiga). Erlangga.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE.
- Brigham, E. F. and J. F. H. (2004). *Fundamentals of Financials Management* (Ten Editio). Thomson: South Western.
- Carlitz, R. (2013). Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*, 31(S1), s49–s67.
- Damanik, R. H. (2018). Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *JAKK (JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN KONTEMPORER)*, 1(1), 89–110.
- Effiom, L., & Edet, S. E. (2019). Challenges to Capital Budget Implementation in Nigeria. *African Research Review*, 13(55), 167–180.
- Fadhilatunnisa, A., Suwondo, S., & Novianty, I. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 577–586.
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *JOM FEKON*, 4(1).
- Gani, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ekonomika*, 13(2), 104–116.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Undip Semarang.
- Grindle, M. S. (2013). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.

- Halim, A. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Han, Y. (2019). The Impact of Accountability Deficit on Agency Performance: Performance-Accountability Regime. *Public Management Review*.
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP). *JAA*, 6(1), 122–139.
- Hermanto, C. B. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Jurnal AKRAB JUARA*, 5(2), 40–56.
- Julnes, P. deL. and M. H. (2011). Promoting the Utilization of Performance Measures in Public Organizations, An Empirical Study of Faktor Affecting Adaptation and Implementation. *Public Administration Review*, 61(6).
- Kaltsum, U. dan A. R. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1–14.
- Kasemin, K. (2015). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi* (Edisi Pert). Prenadamedia Group.
- Kenis, I. (2019). Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, 14(4), 172–189.
- Klase, K. A. (2008). The Impact Of Performance Budgeting On State Budget Outcomes. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 20(3), 277–298.
- Kung, F.-H., Huang, C.-L., & Cheng, C.-L. (2013). An examination of the relationships among budget emphasis, budget planning models and performance. *Emerald*, 51(1).
- Kusuma, A. F. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9), 1–18.
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara.
- Latif. (2014). *Perencanaan Anggaran*. BPFEE.
- Lawyer, C. O. (2014). Cost Control and Accountability for Effective Budget Implementation. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(21), 199–202.
- Lupia, A. & M. M. (2013). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing* (Second edi). Chatham House

Publishers, Inc.

- Mahdalena, H., Syarifuddin, & Said, D. (2021). Budget Accountability in The Perspective of Habermas Communicative Action Theory. *SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION*, 1(2), 61–72.
- Mahpudin, E., Santoso, M. P. T., & Huda, S. (2017). Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Instansi Pemerintah Daerah). *JRKA*, 3(2), 1–19.
- Mahsun. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Keti). BPFPE.
- Mardiasmo. (2016a). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016b). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. In *Universitas Gadjah Mada*. Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Mattoasi, Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109.
- Mauro, S. G. (2017). Manajemen Publik Baru Antara Realitas dan Ilusi: Menganalisis Validitas Penganggaran Berbasis Kinerja. *Tinjauan Akuntansi Inggris*. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.02.007%0A>
- Moe, T. M. (2014). *The New Economics of Organization* (Second edi). Harper Collins Publishers Inc.
- Ogujiuba, K. K., & Ehigiamusoe, K. (2014). Capital Budget Implementation in Nigeria: Evidence from the 2012 Capital Budget. *CONTEMPORARY ECONOMICS*, 8(3), 299–314.
- Olurankinse, F., & Oloruntoba, S. R. (2017). Empirical Analysis of the Effect of Accountability on Budget Implementation in Ondo State Nigeria. *Canadian Social Science*, 13(3), 27–32.
- Onyiah, I. A., Ezeamama, N. C., Ugwu, J. N., & Mgbodile, C. C. (2016). Nigerian Budget Implementation and Control Reforms: Tool for Macro Economic Growth. *British Journal of Economics, Management & Trade*, 11(2), 1–13.
- Romenska, K., Chentsov, V., Rozhko, O., & Uspalenko, V. (2020). Budget Management and Accountability: Evidence from Kenyan Local Authorities. *Problems and Perspectives in Management*, 18(2), 246–260.
- Safitri, F. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4083–4094.
- Santoso, B. (2015). *Keagenan (Agency) Prinsip – Prinsip Dasar, Teori dan Problematika Hukum Keagenan*. Ghalia Indonesia.
- Sefriyana, Melfariza, & Aprila, N. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran*

Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. Universitas Bengkulu.

- Septiyani, G., Taufik, T., & Julita. (2020). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Apakah Dipengaruhi Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan. *CURRENT Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(2), 183–200.
- Smith, R. W. & M. B. (2013). *Principals and agents: An explanatory model of public budgeting*. Chatham House Publishers, Inc.
- Sofyani, H. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” *Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Bisnis*, 13(1).
- Staf Kepresidenan Republik Indonesia. (2022). *Capaian Kinerja Indonesia*.
- Subaweh, I. (2018). *Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah*. Salemba Empat.
- Sudaryanti, D. (2013). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–24.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Alfabeta* (Bandung). Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sunarya, H. (2021). ANALISIS KINERJA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG. *JURNAL AKUNTANSI (JA)*, 8(2), 13–24.
- Surianti, M. (2017). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Di Publik Sektor (Kasus Indonesia: Tinjauan Pustaka). *Jurnal Internasional Ekonomi Berkembang Dan Berkembang*, 5(2).
- Sutarman. (2017). *Pengantar Teknologi Informasi*. Bumi Aksara.
- Sya’roni, M., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8).
- Ugoh, S. C., & Ukpere, W. I. (2009). Problems and prospects of budgeting and budget implementation in Local Government System in Nigeria. *African Journal of Business Management*, 3(12), 836–846.
- Utami, E. F. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *JOM FEB*, 7(2), 1–15.

- Utami, W. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA*, 2(4), 56–68.
- Viapina, F. (2020). Anggaran Berbasis Kinerja di Peradilan: Alokasi Sumber Daya dan Variabilitas Kinerja di Pengadilan Tingkat Pertama (Sebuah Analisis Tiga Studi Kasus). *JPBAFM*, 33(2).
- Wahdatul, L. (2021). Tentang Pengaruh Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bekasi Agensi Pemerintahan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5477–5485.
- Wibisono, S. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(9), 1–22.
- Winara, P., & Putri, R. S. (2019a). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi dan Tunjangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Sekretariat BPSDM Perhubungan. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST*, 2(2), 186–202.
- Winara, P., & Putri, R. S. (2019b). PENGARUH PERENCANAAN, PELAKSANAAN, LAPORAN KEUANGAN, EVALUASI DAN TUNJANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA DENGAN SISTEM INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA SEKRETARIAT BPSDM PERHUBUNGAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST*, 2(2), 186–202.
- Yaumi, M. (2018). *Media dan Teknologi Pembelajaran* (Cetakan Pe). Prenadamedia Group.
- Yudistira, F. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yuliani, N. L. (2018). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 301–312.
- Zainab. (2020). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, LAPORAN REALISASI ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DESA. *Media Mahardhika*, 18(2), 241–254.